

Belanja Pemerintah Topang Ekonomi, Samarinda Penyumbang Terbesar



(Sumber gambar : kaltimpost.co.id) Senin, 02/06/2025

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Anggaran pemerintah memegang peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2024. Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP) tercatat menyumbang 5,96 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.

Sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota Kaltim, Samarinda menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan Komponen PKP. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim menunjukkan bahwa Samarinda menyumbang hingga 34,37 persen dari total PKP seluruh kabupaten/kota di Kaltim.

“Dua wilayah lain yang juga cukup berperan dalam pembentukan total Komponen PKP adalah Kutai Kartanegara (17,25 persen) dan Kota Balikpapan (11,16 persen),” beber Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana.

Kabar baiknya, seluruh dari 10 kabupaten/kota di Kaltim mencatatkan pertumbuhan positif pada komponen PKP pada 2024. Yusniar mengungkapkan bahwa pertumbuhan tertinggi diraih oleh Penajam Paser Utara (PPU) dengan angka fantastis mencapai 30,53 persen.

“Lonjakan pertumbuhan PKP di PPU ini sejalan dengan peningkatan belanja pemerintah yang tercermin dalam data realisasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Penajam Paser Utara,” jelasnya.

Selain PPU, Berau (28,38 persen) dan Bontang (26,91 persen) juga mencatatkan pertumbuhan PKP yang impresif, keduanya melampaui angka 25 persen. Sementara itu, Kutai Barat mencatatkan pertumbuhan PKP paling rendah, yaitu sebesar 3,02 persen.

Secara umum, Yusniar menjelaskan bahwa kenaikan PKP yang cukup tinggi di hampir seluruh kabupaten/kota Kaltim disebabkan oleh beberapa faktor. “Peningkatan belanja pegawai, terutama kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta kenaikan belanja barang dan jasa, terutama dalam rangka penyelenggaraan berbagai *event* regional dan nasional, menjadi pendorong utama pertumbuhan PKP ini,” terangnya.

Belanja pemerintah yang meningkat memberikan stimulus signifikan terhadap perekonomian daerah. Kenaikan TPP secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat, sementara belanja barang dan jasa, terutama untuk *event*, menggerakkan sektor-sektor terkait seperti perhotelan, transportasi, dan UMKM.

Pertumbuhan PKP yang signifikan di PPU juga tidak terlepas dari masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang berjalan. Belanja pemerintah untuk infrastruktur dan berbagai kebutuhan terkait IKN turut mendorong angka PKP di wilayah tersebut. **(ndu)**

Sumber berita:

Kaltim Post, Belanja Pemerintah Topang Ekonomi Samarinda Penyumbang Terbesar, 02/06/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa klasifikasi belanja daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga;
 - d. belanja transfer.